

MOTIF DI BALIK PERSETUJUAN TIONGKOK TERHADAP PARIS AGREEMENT 2015: SEBAGAI PENGUATAN DAYA TARIK PRODUK SOLAR PHOTOVOLTAIC

Pinaka Swastiratu

Departemen Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga
Email: pswastiratu@gmail.com

Abstrak

Penulisan ini berfokus pada motif dibalik ratifikasi Tiongkok di bawah pemerintahan Xi Jinping pada Paris Agreement 2015. Pilihan kebijakan lingkungan dipengaruhi oleh keragaman motif. Terdapat motif selain motif lingkungan, yaitu ekonomi politik. Pertumbuhan eksponensial dalam perkembangan solar PV Tiongkok, merefleksikan keseriusan Tiongkok dalam mengembangkan solar photovoltaic (PV), selain itu Tiongkok juga melakukan berbagai upaya dukungan melalui kebijakan-kebijakannya dalam mengembangkan solar PV. Ketika negara meyetujui Paris Agreement, energi terbarukan seperti, solar photovoltaic menjadi dasar bagi target pengurangan karbon yang diberlakukan pada masing-masing pihak yang telah meratifikasi Paris Agreement. Target pengembangan energi non-fosil sejalan dengan bisnis pengembangan solar PV yang dijalankan oleh Tiongkok saat ini. Sehingga, bentuk dari motif ekonomi politik tersebut adalah Tiongkok memaksimalkan dukungan politiknya melalui kebijakan untuk meratifikasi Paris Agreement. Dukungan politik tersebut dilandasi oleh tujuan ekonomi, yakni untuk menguatkan daya tarik industri solar PV.

Kata kunci: Paris Agreement, Tiongkok, Solar Photovoltaic, Motif Lingkungan, Motif Ekonomi Politik, Daya Tarik

Abstract

This paper examines the motives behind China's ratification on the Paris Agreement under Xi Jinping's administration in 2015. The selection of this environmental policy was influenced by various motives. There were motives other than environmental motives, namely political economic motives. The means to asses whether there were political economic motives can be seen by tracing the policies, intensity, and seriousness of China in pursuing its economy. The Exponential growth in China's PV solar development reflects this country's seriousness in developing solar photovoltaic (PV), more over China also made various support efforts through its policies in developing solar PV. The moment a state approved the Paris Agreement, renewable energy such as solar photovoltaic became the basis for the carbon reduction targets imposed on each party that had ratified the Paris Agreement. The non-fossil energy development target is in line with China's current solar PV business development. Thus, the form of the political economic motive is that, China maximizes its political support through a policy to ratify the Paris Agreement. This political support is based on economic goals, specifically to strengthen the industrial attractiveness of the solar PV.

Keywords: Paris Agreement, China, Solar Photovoltaic, Environmental Motives, Political Economic Motives, Attractiveness

Pada tahun 2016, Tiongkok di bawah pemerintahan Xi Jinping meratifikasi *the Paris climate change agreement* (Phillips 2016). Keputusan Tiongkok dalam meratifikasi Paris Agreement mengenai Perubahan Iklim menjadi menarik ketika diketahui fakta bahwa Tiongkok sebelumnya menolak untuk meratifikasi rezim terkait perubahan iklim, seperti Protokol Kyoto, selain itu, negara tersebut merupakan negara penghasil emisi gas rumah kaca global terbesar dan konsumsi energi terbesar di dunia. Pertumbuhan perekonomian Tiongkok ditopang oleh batu bara dengan rata-rata 69,9 persen dari konsumsi energi negara tersebut di antara tahun 1985 dan 2016. Pertumbuhan perekonomian Tiongkok yang ditopang oleh energi primer, seperti batu bara, membuat upaya untuk meminimalisir perubahan iklim, seperti pengambilan komitmen untuk mengurangi emisi sulit dilakukan bagi Tiongkok, karena dapat bertentangan dengan pembangunan perekonomian negara tersebut. Setelah meratifikasi Paris Agreement, negara-negara yang telah meratifikasi perjanjian tersebut diharuskan untuk mempersiapkan, mengkomunikasikan, dan mempertahankan *Nationally Determined contributions* (NDC) yang ingin dicapai. Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 4 Paragraf 2 dalam Paris Agreement. NDC merupakan upaya masing-masing negara untuk mengurangi emisi nasional dan beradaptasi dengan dampak perubahan iklim. Komitmen NDC satu negara dengan negara lain berbeda-beda, karena disesuaikan dengan kemampuan negara. Meski masing-masing diberlakukan target dengan kuantitas yang berbeda, namun terdapat kesamaan dari beberapa NDC, yaitu memasukkan target untuk mengembangkan bahan bakar non-fosil. Pengembangan bahan bakar non fosil memainkan peran penting atau menjadi dasar bagi target pengurangan karbon yang diberlakukan pada masing-masing pihak yang telah meratifikasi perjanjian tersebut (UNFCCC t.t.). Salah satu pengembangan bahan bakar non fosil yang dijadikan sebagai dasar bagi target pengurangan emisi, yaitu solar photovoltaic.

Negara produsen solar PV terbesar di dunia sejak tahun 2011, yaitu Tiongkok. Tiongkok telah memberikan dukungan terhadap solar photovoltaic sejak tahun 1986 dari *seventh Five-Year Plan*, walaupun pengembangan PV awalnya dilakukan oleh Tiongkok dalam skala kecil, namun selama dekade pertama di abad ke-21, industri PV Tiongkok meledak dengan kecepatan luar biasa (Kong 2015). Ekonomi global berjalan dengan sangat baik, sehingga banyak negara di Eropa memutuskan untuk memperluas kapasitas instalasi PV. Permintaan dan keuntungan yang besar pada periode tersebut membuat ratusan perusahaan PV didirikan di Tiongkok, yang kemudian hampir seluruh produk PV diekspor ke Eropa dan Amerika Serikat. Pemerintah Tiongkok melihat peluang untuk meningkatkan pendapatan pajak, dan mendorong lebih banyak modal untuk diinvestasikan dalam industri tersebut. Pada tahun 2010, produksi Tiongkok, melebihi 50% dari produksi global (Zhao 2018). Meski Tiongkok terlambat dalam mengembangkan solar, namun negara saat ini mengambil peran dominan dalam produksi PV di dunia dan menggeser posisi Jepang yang sempat menjadi produsen solar PV terbesar di dunia (Colhoun dan Turner 2004). Melihat bagaimana Tiongkok yang semakin aktif dalam melakukan penjualan dan pembangunan industri solar PV membuat pandangan baru tentang bagaimana Tiongkok memandang prospek bisnis didalam sebuah isu permasalahan lingkungan yang sedang dihadapi secara global. Berangkat dari hal tersebut penulis menilai bahwa Tiongkok dalam meratifikasi Paris Agreement memiliki tujuan lain selain tujuan utama yaitu tujuan perlindungan

lingkungan. Besarnya kebutuhan akan energi terbarukan yang berjalan lurus dengan potensi keberhasilan Tiongkok melalui industri solar PV dapat dinilai sebagai alasan kuat bagaimana Tiongkok yang merupakan negara penghasil polusi terbesar, di bawah pemerintahan Xi Jinping meratifikasi Paris Agreement. Yaitu, untuk semakin menguatkan daya tarik Tiongkok terhadap produk solar PV yang semakin diminati secara global.

Kebijakan Lingkungan dan Motifnya

Kebijakan lingkungan merupakan pendekatan yang digunakan sebagai instrumen dalam menganalisis motif dibalik persetujuan Tiongkok terhadap Paris Agreement 2015. Pendekatan terkait lingkungan dapat ditelusuri melalui empat perspektif, yaitu liberalisme, ekologiisme, marxisme, dan anarkisme (Carter 2007). Melalui keempat perspektif tersebut, dapat terlihat bahwa pilihan kebijakan lingkungan dipengaruhi oleh dua motif, yaitu motif lingkungan dan motif ekonomi politik. Motif lingkungan merupakan alat untuk membentuk dan meningkatkan kemauan individu atau negara untuk terlibat dalam perlindungan lingkungan. Pernyataan tersebut berarti bahwa lingkungan merupakan alasan yang mendasari perilaku individu atau negara untuk mengambil kebijakan. Motif lingkungan tidak hanya mendorong negara agar ikut terlibat secara sukarela dalam organisasi internasional, melainkan apabila lingkungan dijadikan alasan yang mendasari perilaku negara, maka negara tersebut akan patuh terhadap peraturan-peraturan terkait perlindungan lingkungan. Cara untuk melihat bahwa terdapat motif lingkungan dapat dilakukan melalui, penelusuran terhadap intensitas, kebijakan, dan keseriusan negara dalam menangani permasalahan lingkungan (Carter 2007).

Motif ekonomi politik merujuk pada ekonomi politik merupakan alasan yang mendasari perilaku atau negara untuk mengambil kebijakan. Berangkat dari pengertian tersebut, maka motif ekonomi politik dalam kebijakan dapat diartikan sebagai pengambilan kebijakan politik yang berorientasi pada lingkungan dijadikan sebagai payung perlindungan dari agenda ekonomi yang dimiliki, atau dengan kata lain, politik merupakan pendukung dan pemberi solusi terhadap permasalahan atau ancaman ekonomi yang terjadi di suatu wilayah, sementara ekonomi menjadi perhatian utama dari pengambilan kebijakan suatu negara. Melalui kebijakan yang berorientasi pada lingkungan, terdapat *economic opportunity*, yaitu meningkatkan pengaruh dan daya tarik kebijakan suatu negara dalam beberapa agenda ekonomi. Hal tersebut sejalan dengan pemikiran para liberalisme, kaum liberalisme berfokus pada kesejahteraan manusia, sehingga lingkungan dipandang memiliki nilai instrumental, yaitu dimanfaatkan dalam memenuhi keinginan manusia atau mengejar material (Carter 2007).

Daya tarik merupakan konsep yang digunakan untuk mengukur karakteristik negara sehubungan dengan pasarnya. Hal tersebut meliputi, industri, bisnis, dan *foreign development investment* (FDI). Negara berlomba-lomba untuk bertahan hidup, dan berkembang. Upaya untuk bertahan hidup dan berkembang dapat dilakukan dengan meningkatkan standar hidup dalam ekonomi, sehingga, negara-negara berlomba-lomba

atau bersaing untuk berinvestasi dan melakukan penjualan ekspor melalui bisnis. Daya tarik negara merupakan sumber daya strategis yang memberikan keunggulan kompetitif berkelanjutan untuk suatu negara, sehingga dalam hal ini, kebijakan pemerintah dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan daya tarik suatu negara dengan mengidentifikasi dan mengatasi kelemahannya. Negara dapat memanfaatkan daya tarik untuk mempromosikan negaranya (Lee 2015). Pencapaian yang diharapkan dari satu negara dalam politik internasional terletak pada kenyataan bahwa negara-negara lain menunjukkan rasa hormat terhadap nilai mereka, dan berharap untuk mencapai standar. Penguatan daya tarik merupakan salah metode dari *soft power*. *Soft power* itu sendiri dapat didefinisikan sebagai kekuatan yang dapat menarik perhatian aktor lain. *Soft power* dapat menggunakan metode yang berbeda untuk membantu kerja sama atau menggunakan rasa nilai yang sama untuk menghasilkan daya tarik. Cara untuk melihat bahwa terdapat motif ekonomi politik, khususnya sebagai upaya penguatan daya tarik, dapat dilakukan melalui, penulurusan terhadap intensitas, kebijakan, dan keseriusan negara dalam menangani permasalahan lingkungan (Lin dan Hongtao 2017).

Pola Kebijakan Lingkungan di Tiongkok

Tiongkok telah memiliki aturan-aturan terkait perlindungan lingkungan sejak tahun 1973, tepatnya setelah partisipasinya dalam *United Nations Conference on the Human Environment (UNCHE)*, yang merupakan konferensi PBB pertama yang membahas mengenai lingkungan dan pembangunan yang kemudian diikuti dengan pembentukan *Environmental Protection Leading Group of the State Council* pada bulan Mei 1974. Selanjutnya pada tahun 1979, Tiongkok mengesahkan UU Perlindungan Lingkungan yang digunakan sebagai uji coba, yang kemudian diikuti dengan pembentukan konstitusi 1982 yang mencakup ketentuan-ketentuan perlindungan lingkungan (Man 2003). UNCHE bukan satu-satunya konferensi yang membahas mengenai lingkungan, melainkan terdapat konferensi lain yang membahas mengenai lingkungan, yaitu *United Nations Conference on Environment and Development (UNCED)* di Rio de Janeiro atau yang dikenal dengan sebutan *the Rio de Janeiro Earth Summit* pada bulan Juni 1992. Pertemuan UNCED membahas mengenai berbagai isu lingkungan. Salah satu isu lingkungan yang dibahas dalam pertemuan tersebut yaitu perubahan iklim. Berangkat dari mengangkat diskusi mengenai perubahan iklim, kemudian hasil dari UNCED meliputi, UNFCCC. UNFCCC adalah salah satu hasil penting dari UNCED. Pertemuan UNCED menghasilkan perjanjian tidak mengikat, seperti Agenda 21 (Cherian 2015). Pada bulan Juli, tepatnya kurang lebih satu bulan setelah UNCED, Tiongkok menerbitkan "*China's Ten Strategic Policies on Environment and Development*", yang kemudian diikuti dengan menerbitkan "*China's Agenda 21*" yang merupakan buku putih atau *white paper* mengenai Kependudukan, Lingkungan, dan Perkembangan Tiongkok pada abad ke-21 (Kunmin et al. 2007). Selanjutnya, pada tahun 1996, Tiongkok menerapkan *the Ninth Five-Year Plan*. Kongres Rakyat Nasional menyetujui *Ninth Five Year Plan for the National Economy and Social Development*, dengan memasukkan tujuan lingkungan. Selama periode *the Ninth Five Year Plan, the Chinese State Environmental Protection Administration (SEPA)* mulai mempromosikan kebijakan *total emission control (TEC)*. Berdasarkan *Ninth Five Year Plan for*

Environmental Protection, kebijakan TEC mengatur 12 transfer polutan yang meliputi, sulfur dioxide (SO₂), *chemical oxygen demand* (COD) dari buangan, minyak mineral dalam limbah, asap, partikulat, sianida, arsenik, merkuri, timbal, *hexavalent chromium*, dan limbah padat (Chazhong et al. 2009).

Meski Tiongkok telah berusaha meningkatkan perlindungan terhadap lingkungan, namun, perekonomian Tiongkok yang terus berkembang memaksakan tuntutan besar terhadap konsumsi energi, selain itu, negara tersebut juga masih bergantung pada batubara sebagai sumber energi utamanya. Selama awal 1990-an, batubara menyumbang hampir tiga perempat dari total konsumsi bahan bakar Tiongkok. Tiongkok tidak hanya merupakan konsumen batu bara terbesar di dunia, melainkan negara tersebut juga merupakan konsumen minyak mentah dan listrik terbesar kedua (Li 2006). Ketergantungan Tiongkok terhadap batu bara memberikan dampak negatif pada lingkungan, mengingat batubara merupakan bahan bakar fosil yang berada di posisi pertama sebagai penghasil emisi terbesar, yang kemudian minyak sebagai bahan bakar fosil penghasil emisi gas rumah kaca terbesar kedua, dan gas alam pada urutan setelah minyak (Richter 2014). Berdasarkan laporan dari *World Health Organization* (WHO) pada tahun 1998, tujuh dari sepuluh kota paling tercemar di dunia merupakan kota-kota yang berada di Tiongkok. *Sulfur dioxide* (SO₂) dan jelaga yang dihasilkan oleh pembakaran batu bara (Man 2003).

Kemudian, pada pertemuan konferensi di Kyoto, Tiongkok mendukung prinsip “*common but differentiated responsibilities*”, yang diperkenalkan dalam pertemuan Protokol Kyoto. Berdasarkan perjanjian Protokol Kyoto, negara-negara maju yang menghasilkan emisi terbesar, memiliki tanggung jawab yang besar dalam perubahan iklim. Hal tersebut berarti bahwa Protokol Kyoto menempatkan beban yang lebih berat pada negara-negara maju yang dikenal dengan ‘*Annex I Parties*’ untuk mengurangi emisi dan membantu pendanaan untuk mencegah perubahan iklim. Pada pertemuan tersebut, Tiongkok masih menganggap dirinya sebagai negara berkembang, dengan alasan PDB per kapita yang rendah dan tingkat kemiskinan yang tinggi. Perdebatan perubahan iklim tentang “*common but differentiated responsibilities*”, diperumit oleh Tiongkok, mengingat sejak Protokol Kyoto dibentuk pada tahun 1997, Tiongkok telah menjadi negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia, selain itu, Tiongkok juga merupakan negara penghasil emisi karbon dioksida terbesar yang kedua (*the Diplomat* 2013). Menurut Gørdil Heggelund (2007), alasan penolakan Tiongkok terhadap komitmen pengurangan emisi, yaitu, karena upaya mengatasi perubahan iklim, seperti pengambilan komitmen pengurangan emisi dapat bertentangan dengan pembangunan ekonomi Tiongkok, mengingat prioritas Tiongkok pada periode tersebut yaitu pembangunan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan stabilitas sosial. Pada tahun 2003, PDB per kapita di Tiongkok untuk pertama kalinya melebihi \$ 1.000. Pendapatan nasional bruto per kapita sebesar \$ 1.500 pada tahun 2004, sedangkan PDB per kapita adalah \$ 1.702 pada tahun 2005. Apabila Tiongkok mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 10-20%, maka PDB negara akan menurun 2%. Ketika pendapatan per kapita meningkat sebesar 5.1%, maka emisi gas rumah kaca juga akan meningkat sebesar 1,29% (Hongyuan 2008). Melalui penelusuran dari tahun ke tahun, terlihat bahwa kebijakan lingkungan kurang didukung oleh implementasi. Selain itu, lingkungan juga

bukan hal yang diprioritaskan oleh Tiongkok, melainkan pembangunan ekonomi lah yang diprioritaskan negara tersebut

Pada tahun 2016, Tiongkok meratifikasi Paris Agreement. Walaupun telah memiliki proposal jangka panjang terkait isu perubahan iklim, namun hal tersebut belum sepenuhnya menunjukkan keseriusan Tiongkok dalam menghadapi permasalahan lingkungan. Paris Agreement yang mengharuskan para pihak untuk mengedepankan upaya-upaya melalui "*Nationally Determined contributions*" (NDC), termasuk Tiongkok yang ditekankan untuk menurunkan emisi karbon dioksida per unit PDB sebesar 60% hingga 65% dari tingkat 2005, Pada tahun 2005, total gas emisi rumah kaca atau greenhouse gas (GHG) Tiongkok, yakni sekitar 7,5 Gigatonnes *Carbon dioxide equivalent* (Gt CO₂ eq). Tiongkok telah berkomitmen untuk menurunkan emisinya sebesar 60% hingga 65 dari tingkat 2005, namun apabila ditinjau berdasarkan fakta, emisi karbon dioksida Tiongkok pada tahun 2017 mencapai 9,1 Gt (IEA 2018). Hal tersebut seharusnya tidak terjadi mengingat Tiongkok telah meratifikasi Paris Agreement yang dengan begitu seharusnya memperkuat komitmen Tiongkok dalam menurunkan emisi karbon di wilayahnya. Pemaparan tersebut merefleksikan secara jelas bahwa pola kebijakan lingkungan di Tiongkok yang tidak didukung oleh implementasi terulang kembali, bahkan ketika Tiongkok telah meratifikasi Paris Agreement.

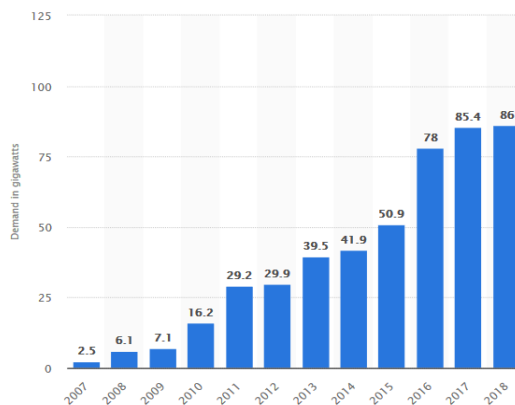
Ekonomi Politik Industri PV Tiongkok

Tiongkok merupakan negara produsen solar PV terbesar di dunia sejak tahun 2011. Tiongkok telah memberikan dukungan terhadap pengembangan solar PV sejak tahun 1986, dari "*Seventh Five-Year Plan*", namun pada awalnya pengembangan Pv masih dilakukan dalam skala kecil, yaitu pedesaan. Kemudian, pada 11 Desember 2001, China secara resmi menjadi anggota dari *the World Trade Organization* (WTO). WTO dipandang sebagai wadah akselerator untuk industri Tiongkok, karena dengan bergabungnya Tiongkok dalam organisasi tersebut, negara tersebut mendapatkan akses lebih mudah ke pasar terbuka. Akses lebih mudah ke pasar terbuka, mendorong China merancang "*Rural Energy Development Plan to 2020 for Western Areas*" pada tahun 2003 (NREL 2004). Pada tahun 2010, produksi Tiongkok, melebihi 50% dari produksi global. Meski Tiongkok terlambat dalam mengembangkan solar, namun negara saat ini mengambil peran dominan dalam produksi PV di dunia dan menggeser posisi Jepang yang sempat menjadi produsen solar PV terbesar di dunia. Pada tahun 2002, Jepang mengambil peran dominan dalam produksi PV, dengan Sharp Corporation milik Jepang yang merupakan perusahaan PV terbesar di dunia pada periode tersebut, Pada tahun 2003, Sharp Corporation meningkatkan produksinya hingga 200 MW dari 123 MW pada tahun 2002 (Colhoun dan Turner 2004).

Pada tahun 2016, Tiongkok di bawah pemerintahan Xi Jinping memutuskan untuk meratifikasi Paris Agreement. Paris Agreement mengharuskan para pihak untuk mengedepankan upaya-upaya melalui "*Nationally Determined contributions*" (NDC).

Dengan adanya komitmen-komitmen yang diberlakukan oleh masing-masing negara untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, solar tentunya memainkan peran penting atau menjadi dasar bagi target pengurangan karbon yang diberlakukan pada masing-masing pihak yang telah meratifikasi perjanjian tersebut. Pada tahun 2016, tepatnya ketika Paris Agreement mulai diberlakukan, terjadi peningkatan permintaan global terhadap solar PV (lihat grafik 1.1). Berdasarkan grafik, terlihat secara jelas bahwa terjadi peningkatan tajam pada permintaan solar PV. Peningkatan tersebut dapat dijadikan sebagai peluang Tiongkok untuk menarik banyak investasi dalam industri dan teknologi terbarukan, seperti solar PV, mengingat solar PV memainkan peran penting atau menjadi dasar bagi target pengurangan karbon yang diberlakukan pada masing-masing pihak yang telah meratifikasi Paris Agreement (Clover 2016).

Grafik 1.1 Peningkatan Permintaan Global terhadap Solar PV



Sumber: PV Magazine International

Manfaat lain yang dirasakan oleh Tiongkok dalam keterlibatannya di Paris Agreement, yaitu Tiongkok menjalin kerjasama dengan Uni Eropa untuk pelaksanaan Perjanjian Paris dalam kerangka inisiatif seperti *the Clean Energy Ministerial*, yang merupakan sebuah forum global yang mempromosikan kebijakan dan berbagi praktik untuk mempercepat transisi menuju energi bersih (Council for European Studies 2018). Kerjasama Uni Eropa dengan Tiongkok menyangkut solar PV terus mengalami peningkatan, hal tersebut dapat dilihat pada tahun 2018, solar PV Tiongkok tidak lagi tunduk pada kontrol perdagangan seperti harga minimum di Uni Eropa. Komisi Eropa mengumumkan bahwa pembatasan perdagangan, yang diperkenalkan pada tahun 2013, telah berakhir pada 3 September 2018. Tiongkok menyambut langkah tersebut sebagai contoh diplomasi perdagangan yang sukses (Clean Energy Wire 2018).

Analisis Keputusan Tiongkok dalam Meratifikasi Paris Agreement Melalui Dua Pendekatan Motif dalam Kebijakan Lingkungan

Kajian teoritik mengenai kebijakan lingkungan telah dijelaskan paragraf sebelumnya. Analisis terhadap keseriusan Tiongkok dalam mengatasi permasalahan lingkungan, dapat dilihat dari implementasi hukum terkait perlindungan lingkungan. Tiongkok

telah memiliki undang-undang mengenai lingkungan sejak tahun 1970-an, seperti pada tahun 1979, posisi Tiongkok dalam Protokol Kyoto, dan komitmen Tiongkok dalam Paris Agreement. Berbicara mengenai implementasi hukum terkait perlindungan lingkungan, meski Tiongkok telah berusaha meningkatkan perlindungan terhadap lingkungan dengan merancang undang-undang terkait perlindungan lingkungan, mengambil langkah perlindungan lingkungan, dan berpartisipasi dalam berbagai konferensi sejak tahun 1972, namun, perekonomian Tiongkok yang terus berkembang memaksakan tuntutan besar terhadap konsumsi energi, selain itu, negara tersebut juga masih bergantung pada batubara sebagai sumber energi utamanya, dengan demikian, sulit bagi Tiongkok untuk meningkatkan perlindungan, mengingat prioritas Tiongkok yaitu pembangunan ekonomi (Li 2006). Sehingga, melalui pemaparan di atas, ketika ditelusuri berdasarkan fakta-fakta dari waktu ke waktu, dapat terlihat bahwa permasalahan lingkungan bukan merupakan alasan yang mendasari negara untuk mengambil kebijakan dan membentuk arah kebijakan, mengingat Tiongkok berdasarkan fakta-faktanya, kebijakan lingkungan kurang didukung oleh implementasi.

Berbeda dengan ketidakseriusan Tiongkok dalam menerapkan kebijakan terkait perlingkungan lingkungan, pertumbuhan eksponensial dalam perkembangan solar PV Tiongkok merefleksikan keseriusan Tiongkok dalam pengembangan solar, selain itu Tiongkok juga melakukan berbagai upaya dukungan melalui kebijakan-kebijakannya dalam mengembangkan PV. Tiongkok yang semakin aktif dalam melakukan penjualan dan pembangunan industri solar PV, serta merancang kebijakan untuk meningkatkan pengembangan solar PV, membuat pandangan baru tentang bagaimana Tiongkok memandang prospek bisnis didalam sebuah isu permasalahan lingkungan yang sedang dihadapi secara global. Penulis melihat bahwa pada tahun 1997 tepatnya ketika Protokol Kyoto, belum ada internasionalisasi yang memudahkan akses terhadap produk Tiongkok. Momentum kemudahan akses diraih ketika Tiongkok resmi menjadi anggota WTO pada tahun 2001, tepatnya setelah Protokol Kyoto dan sebelum Paris Agreement. WTO merupakan wadah akselerator untuk industri Tiongkok, karena dengan bergabungnya Tiongkok dalam organisasi tersebut, negara tersebut mendapatkan akses lebih mudah ke pasar terbuka dan produk yang diciptakan oleh Tiongkok tidak lagi tunduk pada hambatan perdagangan luar energi. Akses lebih mudah ke pasar terbuka, mendorong Tiongkok merancang Rural Energy Development Plan to 2020 for Western Areas pada tahun 2003 (NREL 2004). Sehingga, hal tersebut dapat dijadikan salah satu alasan mengapa Tiongkok tidak meratifikasi Protokol Kyoto, tetapi meratifikasi Paris Agreement, karena Paris Agreement diselenggarakan setelah Tiongkok bergabung dengan WTO dan terdapat akses pasar. Selanjutnya, pada tanggal 28 Februari 2005, Tiongkok mengadopsi *Renewable Energy Law of Tiongkok*, yang kemudian hukum tersebut diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2006. Undang-undang tersebut memberikan status hukum untuk energi terbarukan dan prioritas pengembangannya. Pendekatan hukum utama dari Hukum Energi Terbarukan mencakup sasaran volume total, akuisisi penuh, harga tetap, pembagian harga yang berbeda dan pendekatan dana pengembangan energi terbarukan (Mu 2014).

Pada tahun 2016, Xi Jinping bersama dengan Amerika Serikat di bawah pemerintahan Barack Obama, memutuskan untuk meratifikasi Paris Agreement. Manfaat yang dirasakan oleh Tiongkok dalam keterlibatannya di Paris Agreement terkait solar PV,

yaitu Tiongkok dapat menjalin kerjasama yang lebih erat dengan Uni Eropa untuk pelaksanaan Perjanjian Paris dalam kerangka inisiatif seperti *the Clean Energy Ministerial*, yang merupakan sebuah forum global yang mempromosikan kebijakan dan berbagi praktik untuk mempercepat transisi menuju energi bersih (Council for European Studies t.t.). Selain itu, Tiongkok juga memperoleh pujian hanya dengan mendorong negara-negara lain untuk memenuhi janji-janji dalam mereduksi emisi, yang dapat dilakukan dengan promosi solar PV, dengan demikian, hal tersebut akan meningkatkan daya tarik solar PV Tiongkok. Tiongkok juga mencari dominasi pasar dalam teknologi energi bersih. Kepemimpinan Tiongkok dalam Paris Agreement, dapat digunakan sebagai peluang untuk Tiongkok dalam mempromosikan solar PV (Foreign Affairs 2016). Apabila Tiongkok tidak meratifikasi Paris Agreement, terdapat kemungkinan Tiongkok meraih sanksi internasional, serta dapat merusak prestise dan reputasi internasional Tiongkok, mengingat Tiongkok juga merupakan produsen solar PV terbesar, selain menjadi negara yang menghasilkan emisi terbesar (Zhang 2013). Selain itu, apabila negara tersebut Tiongkok tidak meratifikasi, terdapat kemungkinan Uni Eropa tetap memberlakukan tariff terhadap solar PV Tiongkok.

Simpulan

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa ratifikasi Tiongkok terhadap Paris Agreement dipengaruhi oleh motif ekonomi politik. Cara untuk membuktikan bahwa terdapat motif ekonomi politik, dapat dilakukan melalui penelusuran terhadap internsitas, kebijakan, dan keseriusan Tiongkok dalam mengejar ekonomi melalui kebijakannya. Motif ekonomi politik dapat dilihat dari perbandingan keseriusan Tiongkok dalam mengembangkan bisnis dengan keseriusan Tiongkok dalam menangani permasalahan lingkungan. Setelah pemaparan-pemaparan berdasarkan fakta dari tahun ke tahun, dapat dilihat bahwa lingkungan bukan hal yang diprioritaskan oleh Tiongkok, melainkan ekonomi, karena dapat dilihat dari pola kebijakan lingkungan di Tiongkok. Kebijakan lingkungan seringkali tidak didukung oleh implementasi, sehingga dalam hal ini, merefleksikan secara jelas bahwa lingkungan bukan merupakan hal yang diprioritaskan oleh Tiongkok, sebaliknya, Lingkungan memiliki nilai instrumental, yang dimanfaatkan untuk mencapai tujuan ekonomi. Ekonomi merupakan alasan yang mendasari negara untuk mengambil kebijakan lingkungan. Tiongkok merupakan negara yang menghadapi permasalahan lingkungan, dengan kata lain, permasalahan lingkungan ini terus terjadi di negara tersebut, sehingga, kekhawatiran terhadap kerentanan lingkungan juga dapat dijadikan alasan bagi Tiongkok untuk meratifikasi Paris Agreement. Meski demikian, Peningkatan eksponensial dalam pengembangan solar PV juga mendorong Tiongkok untuk meratifikasi Tiongkok.

Selain itu, motif ekonomi politik dalam kebijakan lingkungan juga dilihat dengan tingginya minat kebutuhan atas permintaan solar PV dan besarnya laba pengembalian yang diperoleh perusahaan industri solar PV membuat solar PV mengalami kemajuan pesat dalam beberapa tahun terakhir di tengah peningkatan kesadaran terhadap isu-isu terkait perubahan iklim, sehingga terdapat *economic opportunity*, ketika berkomitmen di rezim mengenai *climate change*, serta dapat dilihat dari keseriusan Tiongkok dalam mengembangkan dan berinvestasi dalam solar PV yang didukung oleh kebijakan-kebijakannya, yang kemudian pengembangan bisnis tersebut sejalan dengan komitmen

yang diberlakukan dalam Paris Agreement. Manfaat lain yang dirasakan oleh Tiongkok dalam keterlibatannya di Paris Agreement, yaitu Tiongkok menjalin kerjasama dengan Uni Eropa. Dengan memiliki pandangan yang sama terhadap lingkungan, hal tersebut dapat meningkatkan kerjasama Tiongkok dengan Uni Eropa, mengingat isu-isu lingkungan merupakan hal yang diprioritaskan oleh Uni Eropa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Carter, Neil, 2007. *The Politics of the Environment: Ideas, Activism, Policy*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Cherian, Anilla, 2015. *Energy and Global Climate Change*. West Sussex: John Wiley & Sons, Ltd.
- Colhoun, Craig dan Brian S. Turner (eds.), 2004. *The Sage Handbook of Sociology*. New York: Oxford University Press.
- Hongyuan, Yu, 2008. *Global Warming and Tiongkok's Environmental Diplomacy*. New York: Nova Science Publishers, Inc.
- Kong, Richard. (eds.), 2015. *Power and Energy*. London: Taylor & Francis Group.
- Man, Joyce Yanyun, 2003. *China's Environmental Policy, and Urban Development*. New Hampshire: Puritan Press Inc.
- Richter, Burton, 2014. *Beyond Smoke and Mirrors: Climate Change and Energy in the 21st Century*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Zhao, Bo, et al., 2018. *Grid-Integrated and Standalone Photovoltaic Distributed Generation Systems: Analysis, Design, and Control*. Singapore: John Wiley & Son, Inc.

Jurnal

- Chazhong, Ge et al., 2009. "China's Total Emission Control Policy: A Critical Review". *Chinese Journal of Population Resources and Environment* 7(2) (2009): 50-58.
- Heggelund, Gørild, 2007. "China's Climate Change Policy: Domestic and International Development," *Asian Perspective* 31 (2): 155-191.

- Kunmin, Zhang et al., 2007. "Environmental Policies in China: Evolvement, Features and Evaluation," *China Population, Resources, and Environment*, 17(2): 1-7.
- Lee, Kwang-Hoon, 2015. "The conceptualization of country attractiveness: a review of research", *International Review of Administrative Sciences*, 0 (0): 69-74.
- Li, Xiaofan, 2006. "Environmental Concerns in Tiongkok: Problem, Policies, and Global Implications," *International Social Science Review* 81(1/2): 43-57.
- Lin, Li dan Leng Hongtao, 2017. "Joseph Nye's Soft Power Theory and Its Revelation Towards Ideological and Political Education," *Humanities and Social Sciences* 5(2): 69-74.

Artikel Online

- Clean Energy Wire, 2018. EU Lifts Tariffs on Chinese Solar Panels / CO2 Fills Germany's Coffers [online]. Dalam <https://www.cleanenergywire.org/news/eu-lifts-tariffs-chinese-solar-panels-co2-fills-germanys-coffers> [diakses pada 14 Oktober 2018].
- Council for European Studies, t.t. The EU and Tiongkok: Prospects of Cooperation on Climate and Energy [online]. Dalam <https://www.europenowjournal.org/2018/06/04/the-eu-and-Tiongkok-prospects-of-cooperation-on-climate-and-energy/> [diakses pada 8 November 2018].
- Foreign Affairs, 2016. The Trouble With Ceding Climate Leadership to China [online]. dalam <https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2016-12-20/trouble-ceding-climate-leadership-Tiongkok> [diakses pada 14 November 2018].
- Clover, Ian, 2016. Ratify Paris Agreement Early to Attract Better RE Investment, G20 Countries Told [online]. Dalam https://www.pv-magazine.com/2016/08/24/ratify-paris-agreement-early-to-attract-better-re-investment-g20-countries-told_100025892/ [diakses pada 8 November 2018].
- International Energy Agency, 2018. Global Energy & CO2 Status Report Emissions [online]. dalam <https://www.iea.org/geco/emissions/> [diakses 1 November 2018].

National Renewable Energy Laboratory, 2004. Renewable Energy Policy in China: Overview [online]. dalam <https://www.nrel.gov/docs/fy04osti/35786.pdf> [diakses pada 29 November 2018]

The Diplomat. 2016. The US and China Play Chicken Over Climate Change [online]. <https://thediplomat.com/2013/11/the-us-and-Tiongkok-play-chicken-over-climate-change/> [diakses pada 21 Oktober 2018]

The United Nations Framework Convention on Climate Change, t.t. Nationally Determined Contributions (NDCs) [online]. dalam <https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/nationally-determined-contributions-ndcs>. [diakses 29 November 2018].

Tom Phillips, 2016. China Ratifies Paris Climate Change Agreement Ahead of G20 [online]. the Guardian, dalam <https://www.theguardian.com/world/2016/sep/03/Tiongkok-ratifies-paris-climate-change-agreement> [diakses pada 26 September 2018]/

Skripsi

Zhang, Shuxiu, 2013. The 'Dragonomic Diplomacy' (De)code. PhD thesis. London: The London School of Economics and Political Science.